

BANTEN DALAM MASA BLOKADE EKONOMI PADA TAHUN 1945-1949

Resta Octavia¹, Risma Margaretha Sinaga², Yusuf Perdana³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

Corresponding E-mail:

ABSTRAK

Banten Dalam Masa Blokade Ekonomi Pada Tahun 1945-1949. Blokade yang dilakukan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayah Indonesia, Banten mengalami kemunduran yang signifikan. Belanda melakukan blokade yang menyebabkan Banten Lemah dan terjadi perubahan dalam sektor sosial, ekonomi, dan militer di wilayah Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Banten dalam masa blokade ekonomi dan mengetahui upaya Pemerintah mempertahankan Banten dalam masa blokade ekonomi pada tahun 1945-1949. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah Historis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Banten dalam menghadapi blokade Belanda mengalami kekurangan baik dari segi kebutuhan makanan, pakaian, dan obat-obatan, meskipun diblokade oleh Belanda masyarakat Banten masih bisa *survive* dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mempertahankan hidup dengan kondisi yang serba kekurangan tersebut. Keberhasilan masyarakat Banten dalam menghadapi blokade ekonomi Belanda tidak luput dari upaya pemerintah dengan diperbolehkan Banten mencetak Uang Republik Indonesia Daerah Banten, Membangun kesehatan brigade, menjaga keamanan dan mempertahankan Banten hingga Banten diakui kedaulatannya.

Kata Kunci: *Blokade, Belanda, Banten, Ekonomi*

ABSTRACT:

Banten in the Period of Economic Blockade in 1945-1949. The blockade carried out by the Dutch after the proclamation of Indonesian independence in the territory of Indonesia, Banten experienced a significant setback. The Dutch carried out a blockade that made Banten Weak and there were changes in the social, economic, and military sectors in the Banten region. This study aims to determine the condition of Banten during the economic blockade and to find out the Government's efforts to defend Banten during the economic blockade in 1945-1949. The method used in this research is historical with data collection techniques used are library techniques, documentation, interviews. The results showed that the condition of the people of Banten in facing the Dutch blockade experienced a shortage both in terms of the need for food, clothing, and medicine, even though the blockade was blocked by the Dutch, the people of Banten were still able to survive by utilizing existing natural resources in order to survive in a state of complete deprivation. The success of the people of Banten in facing the Dutch economic blockade did not escape the government's efforts by allowing Banten to print money from the Republic of Indonesia for the Banten Region, building the health of the brigade, maintaining security and defending Banten until Banten's sovereignty was recognized.

Keywords : *Blockade, Netherlands, Banten, Economy,*

I. PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa itu menjadi tonggak penting Bangsa Indonesia, karena dengan proklamasi tersebut Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dirinya sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kejadian pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan berdiri sendiri secara tunggal, tetapi merupakan puncak dari rangkaian kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Proklamasi dianggap sebagai titik kulminasi perjuangan panjang Bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Cara pandang seperti itu, berarti masuk akal kiranya apabila. Proklamasi merupakan bagian dari rangkaian panjang perjuangan Bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya (Rinardi, 2017).

Kemerdekaan yang telah di capai oleh Bangsa Indonesia bukan semata-mata pemberian dari penjajah, melainkan hasil dari semangat dan perjuangan yang sangat panjang yang sudah di lalui dalam kurun waktu yang begitu lama. Proklamasi tidak bisa lepas akan peran setiap daerah yang ada di Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah dan mencapai tujuan yaitu Kemerdekaan Indonesia. Masalah selanjutnya yang dihadapi Bangsa Indonesia pasca proklamasi adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Sesaat setelah berita proklamasi kemerdekaan menyebar, terjadi perubahan-perubahan sosial-politik diberbagai sudut Indonesia, salah satunya juga terjadi di Banten. Agresi Militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947 yang dilaksanakan serentak ke seluruh Wilayah RI tidak menguasai Banten. Banten hanya didesak ke Barat dan blokade terhadap daerah ini diperketat. Ada beberapa kemungkinan mengapa daerah paling ujung Jawa ini tidak diserang. Pertama, jika dilihat dari segi ekonomi, Banten bukan daerah yang menguntungkan jika dikuasai. Kedua, dari segi politik, Belanda sangat meragukan Banten apakah daerah itu setelah dikuasai dapat dijadikan daerah yang berdiri sendiri diluar RI, mengingat kebencian rakyat Banten terhadap Belanda. Belanda hanya mengisolasi daerah itu rapat-rapat yang tujuannya untuk melumpuhkannya. Integrasi Banten dengan Pemerintah Pusat kembali mendapat gangguan, Banten mau dipisahkan dari RI. Banten diblokade secara total agar menjadi lemah yang tujuannya untuk melepaskan daerah itu dari Negara Kesatuan RI. Belanda juga melakukan blokade laut. Perairan Selat Sunda diawasi dengan ketat. Setiap hari kapal perang Belanda mondar-mandir didekat pelabuhan Merak. Banten diisolasi dan diblokade oleh Belanda sehingga hubungan dari daerah itu kedaerah lain atau sebaliknya lewat jalan darat sukar, termasuk hubungan dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Berbagai kondisi kekurangan segala infrastuktur, lemahnya ekonomi, dan ancaman dari pihak belanda. Akibat blokade ini kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Banten mengalami goncangan. Krisis di Banten inilah yang menjadi tujuan Belanda. Kebutuhan hidup sehari-hari sulit ditemui, walaupun ada harganya sangat mahal. Untuk mengatasinya, rakyat membuat barang-barang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Untuk mengatasi kebutuhan hidup masyarakat, berbagai cara dilakukan, baik oleh rakyat maupun Pemerintah Daerah Banten. Rakyat antara lain ada yang membuat barang-barang tertentu dan menggunakan barang-barang lain sebagai pengganti. Beberapa jenis barang dari luar dengan cara-cara tertentu. Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan penghasilan daerah dengan

berbagai cara, seperti mengeluarkan aturan-aturan baik terhadap para pedagang maupun masyarakat agar hasil-hasil daerah Banten digunakan sebaik-baiknya K.H. Tb Ahmad Chatib sebagai Residen Banten berinisiatif melakukan kebijakan mencetak URIDABS (Uang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara) agar masalah ekonomi pada saat itu dapat diatasi (Gilang, 2016: 38).

Terdapat dua peristiwa penting, yaitu revolusi sosial dan tempat pencetakan uang daerah untuk Banten. Tahun 1947 di Serang tentara Belanda di bawah naungan. Pasukan Sekutu melakukan blokade darat dan laut. Pemerintahan di Serang pun putus komunikasi dengan Pemerintah RI yang berada di Yogyakarta. Perekonomian di Serang tetap berjalan, pemerintah pusat mengizinkan daerah Banten untuk mencetak uang daerah sendiri bernama Uang Republik Indonesia Daerah Banten (URIDAB). Pencetakan uang daerah di Banten diawali dengan perpindahan Ibu kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Belanda yang datang ke Indonesia dengan cara membonceng NICA melakukan kekacauan, penyerangan, dan memblokade ekonomi. Daerah-daerah yang lokasinya jauh dengan Ibu Kota RI sangat kesulitan berkomunikasi, sehingga pemerintah pusat yang berkedudukan di Yogyakarta memberikan wewenang kepada Residen Banten Achmad Chatib untuk mencetak mata uang sendiri dengan nama URIDAB (Uang Republik Indonesia Daerah Banten) (Lasmiyati, 2012: 476).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode sejarah dalam pengertian umum adalah suatu penyelidikan permasalahan dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari pandangan historis (Abdurrahman, 1999: 53). Untuk melaksanakan penelitian dengan metode historis maka menurut Kuntowijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah menerangkan bahwa kesimpulan sejarah harus didasarkan dengan empat tahapan:

1. **Heuristik** atau pengumpulan data sejarah yang betul-betul valid dan autentik yang kemudian terbagi data primer dan sekunder; Sumber-sumber yang dimaksud berupa buku, arsip dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, dalam penelitian ini peneliti mencari, mengumpulkan data- data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku- buku maupun dokumen baik bentuk tercetak maupun non-cetak (e-book). Sumber primer dan sekunder yang digunakan seperti:
 - A. Buku yang ditulis oleh Halwan Microb, M.Sc. dan A. Mudjahid Chudari tahun 1993 "Catatan Masa lalu Banten" Buku ini berisi tentang catatan sejarah Banten dari pra sejarah hingga perang mempertahankan kemerdekaan republic di wilayah Banten.
 - B. Buku yang ditulis oleh Suharto tahun 2001 "Banten-Sejarah Revolusi 1945-1949" Buku ini berisi tentang dalam masa revolusi di Banten terjadi persaingan antara berbagai kelompok sosial untuk memegang kekuasaan. Pada awal masa revolusi, pada hari-hari pertama setelah Indonesia merdeka, di Banten terdapat aparat Pemerintah Daerah yang lama dipimpin oleh R.T. Ranga Tirtasoejatna, di pihak lain terdapat kelompok-kelompok sosial, seperti kelompok pemuda, ulama, dan jawara. Kelompok-kelompok

sosial diluar aparat Pemerintah Daerah yang lama, setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan berjuang untuk merebut kekuasaan

- C. Buku yang ditulis oleh Lubis, Nina H tahun 2004 “Banten dalam Pergumulan Sejarah”. Buku ini menjelaskan tentang sejarah Banten sejak masa pra sejarah hingga terbentuknya provinsi Banten dengan menitikberatkan pada sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu dijelaskan pula tentang peranan Sultan, Ulama, dan Jawara pada kehidupan masyarakat Banten.
 - D. Buku yang ditulis Mutia Madjiah tahun 1993 “Dokter Gerilya” Buku ini berisi tentang Sejarah Banten dari romantika perjuangan hingga Tragedi di Banten Selatan, buku ini berkaitan tentang peran dokter dan kesehatan yang berperan penting dalam peristiwa yang terjadi di Banten.
 - E. Jurnal yang digunakan oleh peneliti yaitu: Lasmiyati. 2012. SEJARAH UANG REPUBLIK INDONESIA BANTEN (URIDAB) (1945-1949) Penulis menulis jurnal ini yang berisikan tentang sejarah terjadinya uang darurat Banten, Gilang, M. I. (2016). Sejarah Lokal Dalam Mengembangkan Patriotisme (Kajian Pada Materi Sejarah Revolusi Fisik Di Banten Tahun 1945-1949) Penulis menulis jurnal ini yang berisikan sejarah revolusi fisik di Banten Tahun 1945-1949 yang dikembangkan dalam kisah perjuangan lokal di Daerah Banten., Wijono, R. S. (2017). Di Bawah Bayang-Bayang Kota: Penataan Daerah di Provinsi Banten dari Zaman Kolonial sampai Zaman Reformasi, Jurnal ini membahas reformasi wilayah yang berlangsung di provinsi termuda di Indonesia yaitu Banten sejak zaman penjajahan Belanda sampai masa reformasi, Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia, Jurnal ini membahas persoalan arti penting Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia, terutama berdasar pada keabsahannya dari segi hukum. Untuk menjawab persoalan hukum yang menyertai peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI.
 - F. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 1985: 234).
2. **Kritik atau pengujian.** kebenaran dari data yang disajikan. Jika sudah betul-betul lulus uji alias kebenarannya tidak disangsikan maka data itu disebut fakta sejarah;
 3. **Interpretasi.** Fakta-fakta sejarah tadi kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial atau ilmu bantu lainnya sehingga dapat diketahui hakikat dibalik kejadian sejarah atau fakta sejarah.
 4. **Histiografi.** Apabila sudah melakukan interpretasi baru masuk tahapan menyimpulkan dengan menuliskannya. Tahap inilah tahap yang disebut historiografi (Kuntowijoyo, 1995: 36).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga lapisan dalam masyarakat Banten yang didasarkan atas ras dan lapisan. Berikut tabel lapisan masyarakat Banten berdasarkan ras:

Tabel 1. Lapisan Masyarakat Banten Berdasarkan Ras

No	Golongan	Masyarakat
1.	Lapisan I	Belanda dan Eropa lainnya
2.	Lapisan II	Timur Asing (Cina, Arab, dan India)
3.	Lapisan III	Rakyat Banten

Sumber: (Sahroni, 2017: 25).

1. Kondisi Banten Dalam Masa Blokade Ekonomi Pada Tahun 1945-1949.

Setelah Proklamasi kemerdekaan hubungan antara Pemerintah RI dan Belanda tetap tegang dikarenakan Belanda masih ingin menduduki wilayah Republik Indonesia. TNI telah memperkirakan bahwa Belanda akan melakukan serangan kembali, namun waktunya tidak bisa diprediksi. Berhubung serangan tentara Belanda telah diperkirakan akan terjadi lagi, maka TNI mengadakan persiapan- persiapan. Pemerintah daerah Banten (republik), dan Kepala Polisi Keresidenan Banten Joesoe Martadilaga beserta anak buahnya meninggalkan kota dan mengungsi ke daerah pedalaman Banten.

Pada tahun 1945-1946 Kondisi banten masih dibuka pabrik minyak kelapa (mexolie) dengan produksi sebulan menghasilkan 400 ton dan sebagian digunakan untuk eksport dan dibuka pertambangan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan akan batubara. Dalam satu bulan dapat diproduksi sebanyak 50 ton, batu bara ini berfungsi menjalankan kereta api untuk perhubungan antara kota Banten guna mengangkut hasil bumi dari daerah pegunungan ke pelabuhan. Pertambangan Cikotok pun terus berjalan, dimana kebutuhan bensin dipenuhi dengan bensin yang terbuat dari karet (Nasution, 1978: 446).

Menjelang akhir tahun 1946, aktivitas operasi laut kapal-kapal Belanda di Selat Sunda mulai meningkat, sehingga kegiatan kapal Pulau Merak I dalam melakukan penyerangan dihentikan karena khawatir diserang patroli Belanda. Patroli angkatan Laut Belanda itu semakin meningkat menjelang dilaksanakannya Agresi Militer I. Adapun maksud dari patroli-patroli itu ialah untuk memblokir perekonomian Republik Indonesia, selain itu patroli juga mereka lakukan dengan pesawat-pesawat terbang yang seringkali melanggar batas wilayah kedaulatan RI (Madjiah, 1986:108).

Perekonomian Banten dibikin tersendat oleh pihak Belanda itu sendiri. Barang- barang yang biasanya didatangkan dari luar daerah sulit didapatkan. Penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintahan militer Belanda.

Rakyat hidup serba kekurangan di beberapa daerah minus malah sudah menderita kelaparan, pengiriman beras dari suatu kecamatan ke kecamatan lainnya malah dilarang oleh pemerintah Belanda, jika terdapat pelanggaran, maka berasnya akan dirampas.

Pasukan Belanda juga meningkatkan aktivitas kapal-kapal patroli di wilayah Banten dan Selat Sunda. Kapal-kapal patroli tersebut, baik berupa kapal darat atau pun laut. Dalam melakukan patroli tersebut, pasukan Belanda sering melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia, sehingga suatu ketika menimbulkan suatu insiden. Insiden antar kedua belah pihak terjadi di wilayah Tangerang, front Parung Panjang, dan front Leuwiliang. Pada Agresi Militer yang dilancarkan pada tanggal 20 Juli 1947 tersebut, Belanda telah melakukan pendudukan dan penyerangan di daerah Tangerang dan sekitar Jakarta. Akibat serangan Belanda terhadap daerah Tangerang tersebut, sejak tahun 1947 Belanda berhasil menguasai daerah Tangerang (Lasmiyati, 2012: 474-475).

Situasi sosial yang sulit menyebabkan para guru disekolah-sekolah tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sebab banyak sekolah yang dijadikan sebagai markas tentara atau tempat menampung pengungsi yang menjadi korban penyerbuan Belanda, berikut kondisi guru dan murid dalam menghadapi blokade Belanda di Banten:

1. Guru: guru-gurunya ada yang merangkap tugas sebagai guru di siang hari dan malam harinya bergerilya. Bila mereka harus bertempur di siang hari maka sekolah diliburkan dan guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah karena tanah air menuntut jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan.
2. Murid: Banyak murid yang tidak dapat menyelesaikan sekolahnya. Kondisi ini berlangsung sampai akhir tahun 1949 (Lubis, N., H, 2004: 179-180).

Banten masa blokade ekonomi Belanda pada tahun 1945-1949 yang di sampaikan oleh Bapak Fajar yaitu:

“Banten suatu daerah yang tidak diserang oleh Belanda melalui agresi militer Belanda pertamanya akan tetapi Belanda melakukan Blokade ekonomi pada Banten di Agresi Militer pertamanya Wilayah Banten hanya diisolasi dan diblokade dari berbagai sisi. Blokade ini perekonomian Banten menjadi tersendat. Barang-barang yang biasanya di datangkan dari luar daerah sulit didapatkan. Keadaan ekonomi Banten pada masa Blokade yang di lakukan Belanda yaitu ekonomi yang menurun sehingga daya beli masyarakat menurun, meskipun sudah hadirnya URIDAB akan tetapi di Banten bagian pelosok masih menggunakan sistem barter demi menunjang kebutuhan hidup di masyarakat Banten pada saat itu”. (wawancara dengan Bapak Fajar pada Selasa, 9 Februari 2021).

Dalam kondisi sosial yang terjadi di masyarakat Banten pada masa Blokade Ekonomi yang di lakukan Belanda terhadap Banten yaitu interaksi terganggu dengan adanya perpecahan yang di lakukan oleh orang cina terhadap kondisi yang sangat

tidak baik-baik saja di Banten. Hadirnya kaum ulama yang ingin mempertahankan Banten masyarakat mulai akan kesadaran untuk bersatu menjaga kesolidan bersama kaum ulama, maka dengan itu masyarakat Banten pada saat itu sangat patuh dengan kaum ulama sebagai pemimpin mereka (Wawancara dengan Bapak Fajar pada Selasa, 09 Februari 2021).

2. Upaya Pemerintah Mempertahankan Banten Dalam Masa Blokade Ekonomi Pada Tahun 1945-1949.

Menurut Bapak Fajar selaku Staff BPCB Banten dan Kepala Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, upaya pemerintah adalah bagaimana pemerintah saat itu ikut terlibat peran dalam mempertahankan Banten dari Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda pada saat itu.

“Peran pemerintah yaitu mengangkat pejabat lokal dan membentuk strategis yang tepat untuk mempertahankan Banten” (Wawancara dengan Bapak Fajar Pada Selasa, 09 Febuari2021).

Berdasarkan pengertian upaya pemerintah dalam mempertahankan Banten yang di sampaikan oleh Bapak Fajar, Pemerintah K.H. Ahmad Chatib sebagai Residen Banten, yang juga seorang ulama, turut membawa para ulama lain yang berkompeten di bidangnya untuk mengisi jabatan resmi Pemerintahan Daerah. Alasan kebijakan K.H. Ahmad Chatib mengangkat para ulama dalam Pemerintahan adalah dari latar belakang sejarah, yang merupakan telah lama mereka perjuangkan. Rangkaian peristiwa perlawanan rakyat yang terjadi di Banten sejak Kesultanan Banten dihapuskan oleh pemerintah kolonial, merupakan sebuah tujuan untuk menampilkan kembali pemerintahan kaum ulam dalam panggung politik, dengan kata lain, mereka ingin menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Upaya Pemerintah Mempertahankan Banten Pada tahun 1945-1949. Fakta sejarah tahun 1945 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintahan Keresidenan Banten dipegang oleh Alim Ulama. Adapun tokoh-tokoh pemerintahan Republik Indonesia di wilayah Keresidenan

Tabel 2. Tokoh Pemerintahan Republik Indonesia di Wilayah Keresidenan Banten

No	Tokoh	Jabatan
1.	K.H. A. Khatib	Residen Banten
2.	K.H. Fatoni	Wakil Residen Banten
3.	K.H. Syam'un	Panglima perang

4.	H. Rafiudin Sutalaksana	Wakil panglima perang
5.	M. Joeosoef Martadilaga	Kepala kepolisian keresidenan Banten
6.	Memed Soegiri Soedibja	Wakil kepala kepolisian
7.	K.H. Abdul Halim	Bupati Kabupaten Pandeglang
8.	K.H. Arbaen	Kepala kepolisian Kab. Pandeglang

Sumber: Mutohharoh, 2017: 37-38.

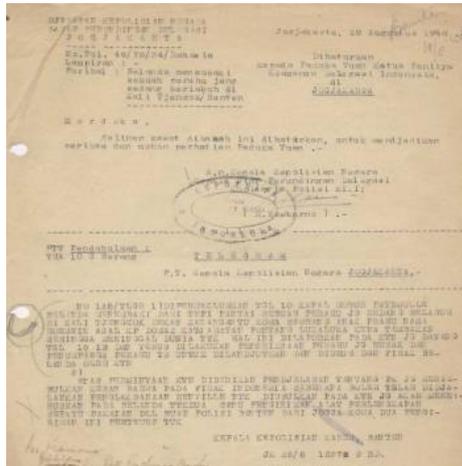
Untuk memenuhi kebutuhan dan alat pembayaran yang sah di daerah, maka pemerintah pusat di Yogyakarta memerintahkan Residen Banten K.H. Achmad Chatib untuk mencetak dan mengeluarkan Uang Kertas Darurat Daerah Banten (URIDAB), khusus untuk wilayah Banten yang termasuk Tangerang, Jasinga, dan Lampung Selatan. Setelah ada persetujuan dari pemerintah pusat, bahwa Serang Banten dijadikan sebagai tempat mencetak Uang Republik Indonesia Daerah melalui Residen Banten Kiai Haji Achmad Chatib, maka mulailah dilakukan pencetakan uang yang diberi nama URIDAB (Lasmiyati, 2012: 476).

Dalam bidang kesehatan Dokter Satrio diproyeksikan untuk menjadi Dokter Divisi, dan pangkatnya pun dinaikkan menjadi Kolonel. Akan tetapi oleh karena status divisi itu kemudian berubah menjadi resimen dan kemudian berubah pula menjadi brigade, maka kedudukan dan jabatan Satrio pun dengan sendirinya ikut berubah-ubah. Sebagaimana diketahui, TKR didekritkan berdirinya pada tanggal 5 Oktober 1945 oleh Presiden Sukarno. Pelaksanaan pembentukannya diserahkan kepada Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, bekas Mayor KNIL, yang menetapkan susunan organisasi dan dislokasi sebagai berikut:

- Markas Tertinggi TKR: untuk seluruh wilayah Indonesia
- Komandemen: untuk daerah propinsi
- Divisi: untuk daerah 2-3 karesidenan
- Resimen: untuk 1-2 kabupaten
- Batalyon: untuk 2-3 kawedanan.

Dalam rangka membentuk TKR ini, Kolonel K.H. Syam'un ditugaskan untuk membentuk Divisi I TKR Banten yang organik administratif masuk Komandemen Jawa Barat (Madjiah, M., 1993:77). Dalam upaya menindaklanjuti kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh pihak Belanda dengan melakukan penembakan kepada masyarakat Banten yang sedang melakukan aktivitasnya yaitu seorang nelayan. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi lagi, pemerintah daerah Banten meminta Bantuan pemerintah pusat agar memberikan perlengkapan senjata kepada polisi untuk melindungi rakyat agar bisa melakukan aktivitasnya.

Gambar 1. Telegram dari Kepolisian Banten tentang Penyerangan di Kali Cengkok



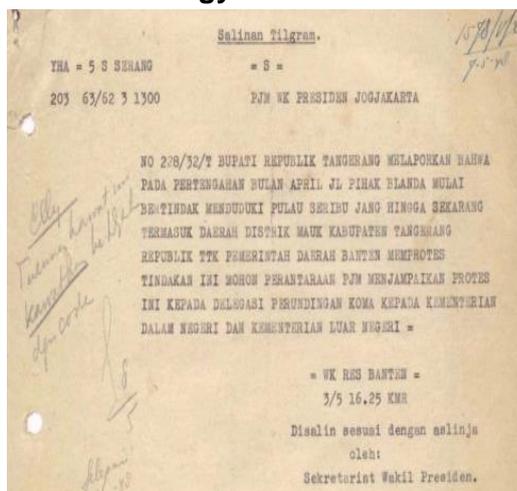
Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia
(diambil pada Senin, 08 Maret 2021)

Maksud bukti pendukung pernyataan di atas yaitu:

“No 125/ TLGR menyatakan untuk menindak lanjuti penyerangan yang di lakukan oleh pihak Belanda di mana sebuah perahu sedang berlabuh di Kali Cengkok dekat Karang Antu, seorang anak perahu yang bernama Hoesein asal Domas Kecamatan Pontang Luka-luka kena tembakan sehingga meninggal dunia. Sehingga diperlukan alat perlengkapan untuk Polisi di Banten”

Dengan blokade yang dilakukan Belanda secara ketat terhadap Banten. Belanda juga menduduki wilayah yang ada di Banten salah satunya yaitu Kepulauan Seribu yang di tanggerang. Pemerintah Daerah Banten berupaya menjaga wilayahnya atas tidankan yang dilakukan Belanda dengan melakukan protesnya.

Gambar 2. Telegram Wakil Residen Banten kepada Wakil Presiden di Yogyakarta



Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 1948
(diambil pada Senin, 08 Maret 2021)

Isi pernyataan dari gambar di atas yaitu:

“No 228/32/T Bupati Republik Tangerang melaporkan pada pertengahan Bulan April Pihak Belanda mulai bertindak menduduki Pulau Seribu yang hingga sekarang termasuk Daerah Distrik Kabupaten Tangerang Republik. Pemerintah Daerah Banten memprotes tindakan ini mohon menyampaikan protes ini kepada Delegasi Perundingan Koma Kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri”.

Blokade Belanda yang ketat terhadap Banten sejak dilancarkan aksi militer pertama, membuat daerah ini terkucil dan terasing dari pemerintahan pusat yang berkedudukan di Yogyakarta maupun pemerintah propinsi Jawa Barat yang untuk sementara ada di Tasikmalaya. Banten tampil daerah yang rusak parah. Tidak ada sedikitpun usaha pertanian atau bercocok tanam, sawah dan kebun penuh dengan semak dan rumput-rumput liar, bahkan yang ada hanya terlihat pucuk pohon kelapa yang telah habis dimakan orang kelaparan yang dialami sejak akhir jaman Jepang, kondisi seluruh wilayah Banten yang di isolasi dan diblokir sedemikian parahnya membuat penduduk dan aparat pemerintah kehabisan tenaga dan semangat tetapi jiwa mereka masih kuat bahkan semakin bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia Usaha untuk menyelesaikan permusuhan antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan melalui diplomasi. Usaha diplomasi itu akhirnya berhasil dengan terselenggaranya KMB di Den Haag sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasilnya adalah bahwa pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Apa yang terjadi di tingkat nasional dilaksanakan di tingkat daerah. Daerah-daerah RI menurut batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan Renville secara berangsur-angsur dikembalikan. Daerah-daerah yang tidak termasuk dalam satu negara bagian, seperti Banten, diserahkan kepada RI Sebelum “penyerahan” kedaulatan di tingkat nasional dilaksanakan, pada tanggal 17 Desember 1949 Keresidenan Banten diserahkan kembali kepada Residen Banten di bawah pimpinan *United Nation Commission for Indonesia (UNCI)*. Banten akhirnya secara resmi kembali menjadi bagian dari wilayah RI (Suharto, 2009: 89).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Blokade ekonomi yang menyengsarakan rakyat Banten dengan kondisi yang serba kekurangan menyebabkan kebutuhan bahan pokok sulit ditemukan, sebagaimana pakaian menggunakan karung goni, dan obat-obatan yang tidak diizinkan masuk namun masyarakat Banten justru memanfaatkan sumber daya yang ada. Upaya Pemerintah Mempertahankan Banten yaitu diizinkan Banten untuk mencetak dan mengeluarkan (URIDAB), membangun kesehatan Brigade, dan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan Banten dengan melakukan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Banten. Kerjasama tersebut menjadikan masyarakat dan pemerintah pada tanggal 17 Desember 1949 Keresidenan Banten diserahkan kembali oleh Pemerintah TBA (Territoriaal Bestuurs Adviseur) kepada Residen Banten di bawah pimpinan *United Nation Commission for Indonesia (UNCI)* dan secara resmi kembali menjadi bagian wilayah RI.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini dan Munandar. (2017). Potensi Pesisir Utara Banten Sebagai Penghasil Garam. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*. 3 (1), 1.
- Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Terapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arfakhsyadz. (2011). Penerapan Blokade Sebagai Metode Perang Kontemporer Dalam Hukum Internasional. *Skripsi*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Basrowi., Juariyah. (2020). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. 1 (1), 3.
- Benny dan Kurniawan. (2012). *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Bell, A. C. (1961). A History of the Blockade of Germany and of the Countries Associated with her in the Great War Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey 1914-1918. London: Her Majesty's Stationery Office.
- Cherif, T. K. S. D., Sahara, W. (1993). A Moroccan-Style Election? Review of African Political Economy.
- Djoened, M., Nugroho, P. (1993). Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojohadikusumo, S. (1953). *Persoalan Ekonomi di Indonesia*. Djakarta: Indira.
- Fahlefi, W., dkk. (2016). Tinjauan Historis Pengaruh Inflasi Indonesia Terhadap Ketahanan Pangan Nasional Tahun 1945-1950. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*. 4 (2), 6.
- Fraunces, M. G. (1992). The International Law of Blockade: New Guiding Principles in Contemporary State Practice. *The Yale Law Journal*. 101 (4). 4.
- Gilang, M. I. (2016). Sejarah Lokal Dalam Mengembangkan Patriotisme (Kajian Pada Materi Sejarah Revousi Fisik Di Banten Tahun 1945-1949). *Jurnal Pendidikan dan Sejarah: Candrasangkala*. ISSN: 2477-2771, e-ISSN: 2477- 8214.
- Husin Sayuti. (1989). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Jakarta: Ombak.
- Imron, I.F.dan Aka, K.A. (2018). *Pembelajaran Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng. ISSN: 978-602-53065-1-8.
- Imron, I. F. dan Aka. (2018). *Pembelajaran Fenomena Sosial Abad 21: Respons dan Kepekaan Diri*. Banyuwangi: LPPM Institute Agama Islam Ibrahimy Genteng.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Selamat datang di KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Pertahanan Indonesia dan Pandangan Mengenai Ancaman serta Ambisi pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia. *fundamentall management journal*. 2 (2), 47.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lasmiyati. (2012). Sejarah uang Republik Indonesia Banten (URIDAB) (1945-1949). *Journal Patanjala*. 4 (3), 467-476.
- Lubis, N., H. (2004). *Banten Dalam pergumuran Sejarah Sultan Ulama Jawa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Madjiah, M. (1993). *Dokter Gerilya*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Manser, M. H dan McGauran, F. (1995). *Kamus Saku Oxford Learner*. HongKong: Oxford University Press.
- M.C. Ricklefs. (2009). *Sejarah Indonesia Modern 1200 -2008*. Jakarta: Serambi.
- Michrob, H. Halwany dan Chaudari, A.Mudjahid. (1993). *Catatan Masalahu Banten*. Serang: Saudara.
- Mutohharoh. (2017). Agresi Militer Belanda di Banten. *Skripsi*. UIN Banten.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nasution, A.H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 1: Proklamasi*. Bandung: Disjarah AD dan Angkasa.
- Nasution. (1983). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ngajenan, M. (1990). *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize.
- Notosusanto, N (editor). (1975). *Sejarah Nasional Indonesia, VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhidayatina. (2013). *Blokade Ekonomi Napoleon Bonaparte dan Dampak Terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-1814*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Notosusanto, N. (1984). *Hakekat Sejarah dan Azas-Azas Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Bookstore.
- Nurhiday., Pribadi, P. (2017). *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. 7 (1), 200.
- Pujiarti. (2015). Kualitas Kimia, Dan Aktivitas Antioksidan Minyak Kenaga. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 9 (1).
- Puspen. (2007). *Konsep Strategi Pertahanan Negara Sesuai doktri TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK)*. Diakses dari <https://tni.mil.id>.
- Rais, M. D. (2001). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. 2 (2), 143.
- Safitri, A. F. (2018). Dampak Pendirian Agentchap Van De Javasche Bank Tedjokjakarta Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Yogyakarta Tahun 1880-1940. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*. 3 (40), 477.
- Sahroni. (2017). Kondisi Pabuaran Pasca Komerdekaan. *Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Sayuti, H. (1989). *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Slamet Muljana. (2008). *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Soeharto. (2009). Banten Pasca Agresi Militer Belanda Kedua. *Makara, Sosial Humaniora*. 13 (2).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (1966). *Revolusi Sosial di Banten, 1945-1949: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Dampaknya*. Naskah Publikasi. Depok: Lembaga penelitian Univeristas Indonesia.
- Suharto. (2009). Banten Pasca Agresi Militer Belanda Kedua. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 13 (02), 1-2).
- Sulaiman, H., F dan Ridwan, H., A. (2019). *STUDI KEBANTENAN dalam Persektif Budaya dan Teknologi*. Untirta Press: Assosiasi Penerbitan Perguruan Tinggi Indonesia.
- Suseno, S. (2002). *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Penerbit Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- TNI Markas Besar. (2020). *Peraturan panglima TNI. Panglima TNI*. Diakses dari <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-66-IX-2010 STRATEGI-MILITER.pdf>.
- Unit Khusus Museum Bank Indonesia. (2007). *Bagian Enam: DJB Masa Revolusi*. Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia.
- Wahyudi, W. (2019). Peran KH. Ahmad Chatib Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonsesia Di Banten Tahun 1945-1949. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Wijono, Radjimo Sastro. (2017). Di Bawah Bayang-Bayang Ibukota: Penataan Daerah Di Provinsi Banten Dari Zaman Kolonial Sampai Zaman Reformasi. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. 2 (2).
- Wiyono., Rosid. (1989). Studi Perbandingan Sifat- Sifat Minyak Kenanga Dari Blitar, Boyolali Dan Cirebon. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*. 6 (6).

Gambar

Arsip Nasional Republik Indonesia

1. Arsip Seorang Anak Perempuan Sedang disuntik oleh Tim Palang Merah di Serang
2. Arsip Suasana di Den Haag pada saat Konferensi Meja Budar.
3. Arsip Telegram Wakil Residen Banten Kepada Wakil Presiden di Yogyakarta.
4. Arsip Telegram dari Kepolisian Banten tentang Penyerangan di Kali Cengklok.
5. Arsip Kebun Kelapa Milik Pribumi.
6. Arsip Alat Pembuatan Minyak Kenanga berupa Tempat Pembakaran atau Penyulingan di Serang, Banten.
7. Arsip Seorang Ibu Memakai Baju yang Terbuat dari Karung.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten.

1. Bagian Belakang Uang 10 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.
2. Gedung Juang 45 Kota Serang.

Delpher. nl, Belanda

1. Surat Kabar Schrikbarende prijzen in Serang (Harga Mengejutkan di Serang).
2. Palang Merah Menawarkan Solusi di Serang
3. Kondisi Ekonomi Banten.

Dinsos, Serang

1. Residen Banten (KH. TB Achmad Chatib Albantani).

Lasmiyati

1. Bagian Depan Uang 10 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.

Museum Bank Indonesia

1. Bagian Depan Uang 5 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.
2. Bagian Belakang Uang 5 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.
3. Bagian Depan Uang 25 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.
4. Bagian Belakang Uang 25 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.
5. Bagian Depan Uang 50 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.
6. Bagian Belakang Uang 50 Rupiah Republik Indonesia Daerah Banten.

Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama

1. Mesin Cetak uang Republik Indonesia Daerah Banten.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1. Rakyat Banten menyatakan Kesetiaan.

Buku Matia Madjiah (Dokter Gerilya)

1. Foto Dokter Satrio.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fajar Setya Burnama Selaku Staff BPCB Banten dan Kepala Museum Situs Kepurbakalaan Banten, Pada Hari Selasa, Tanggal 9 Februari 2021 Pukul: 13.00 WIB.